

**KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA ISLAM
(SIYASAH SYAR'İYAH)
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



**FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022-2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah selesai disusun. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menjadi salah satu fungsi strategis dalam menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk PTKI. PTKI didorong dapat mengembangkan pembelajaran yang otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja.

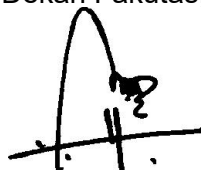
Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga dapat mewujudkan pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Pembelajaran diselenggarakan secara kreatif dan inovatif. Program hak belajar tiga semester di luar program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi.

Panduan ini membahas prosedur desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas. Adapun fokus implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana pada PTKI.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penulis panduan ini dan semua pihak atas dedikasinya membantu penulisan naskah ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola Fakultas dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di Fakultas serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bengkulu, Juli 2022
Dekan Fakultas,



Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

LEMBAR PENGESAHAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nama Program Studi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syarriyah)
Fakultas : Syari'ah
Izin Penyelenggaraan/Operasional: Nomor 2869 Tahun 2012
: B 1825/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017

Setelah dilakukan Analisa dan Verifikasi kurikulum Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disusun oleh tim penyusun kurikulum program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syarriyah) maka dengan ini menyatakan syah untuk diberlakukan mahasiswa angkatan 2022/2023, jika terdapat maka akan dilakukan penyempurnaan terhadap kurikulum tahun akademik berikutnya.

Disahkan : di Bengkulu
Tanggal : Juli 2022

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas,



Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Koordinator Prodi,



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
DAFTAR ISI.....	4
PROFIL PROGRAM STUDI.....	5
Nama Program Studi	5
Jenjang.....	5
Sejarah singkat program studi.....	5
KURIKULUM PRODI HTN-I (Siyasah Syar'iyah)	5
PENDAHULUAN.....	5
LANDASAN KURIKULUM	7
STRUKTUR KURIKULUM	8
Visi, Misi dan Tujuan	8
Profil Lulusan	8
Capaian Pembelajaran.....	9
Pemetaan Bahan Kajian	10
Struktur dan Sebaran Mata Kuliah	21
Struktur Kurikulum.....	27
Agihan Mata Kuliah.....	30
Keluasan dan Kedalaman Mata Kuliah.....	34
Model Penerapan	37
Proses Pendekatan dan metode pembelajaran.....	38
Penilaian.....	38
PENUTUP	39

A. PROFIL PROGRAM STUDI

1. Nama Program Studi : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariahyah)
2. Jenjang : Strata Satu (S1)
3. Sejarah singkat :

Program Studi Hukum Tata Negara (Prodi HTN) merupakan Prodi yang didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2869 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S.1) Pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tanggal 28 Desember 2012. Prodi HTN (Siyasah) ini didirikan dalam rangka mengakomodasi animo masyarakat yang sejak bergulirnya reformasi ketatanegaraan Indonesia yang diawali dengan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 (empat) kali telah membuka wawasan masyarakat mengenai pentingnya mempelajari Hukum Tata Negara dalam mengelola negara dan luasnya lapangan kerja bagi lulusan Sarjana Hukum Tata Negara. Adapun mahasiswa angkatan pertama Prodi HTN (Siyasah) berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang yang diambil dari Prodi Filsafat Politik Islam Fakultas Ushuludin, Adab, dan Dakwah yang pada saat itu, di waktu bersamaan dengan pendirian Prodi HTN, Prodi Filsafat Politik Islam dihapuskan, dan mahasiswa Semester 3 dari Prodi Filsafat Politik Islam menjadi mahasiswa angkatan pertama Prodi HTN. Setelah itu, Prodi HTN (Siyasah) dari tahun ke tahun semakin berkembang, baik dari jumlah mahasiswanya maupun dari segi kualitas lulusannya. Sampai saat ini Prodi HTN sudah meluluskan banyak alumni yang telah bekerja dan tersebar di berbagai institusi, baik institusi pemerintahan maupun swasta. Dari segi kualitas Prodi HTN (Siyasah) juga mengalami peningkatan, yang sejak awal berdiri yang belum terakreditasi sampai pada tahun 2015 akhirnya terakreditasi C berdasarkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Nomor 061/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Prodi HTN berdasarkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Nomor 1825/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 telah terakreditasi B.

B. KURIKULUM PRODI

1. PENDAHULUAN

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja terus diupayakan. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, lulusan pendidikan tinggi setidaknya memiliki capaian pembelajaran sebagaimana capaian kompetensi yang dimiliki seseorang yang mengikuti pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi termasuk PTKI, kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menjadi salah satu jawaban strategis yang dapat diimplementasikan PTKI dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi karena dengan kebijakan tersebut mendorong perguruan tinggi semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mencakup empat kebijakan pokok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diwujudkan melalui program hak belajar tiga semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran yang fleksibel dan otonom yang dapat diikuti mahasiswa. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran selama program sarjana di PTKI. Dengan program hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan hak kebebasan dan kesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan kegiatan pembelajaran yang beragam di luar program studi.

Kegiatan pembelajaran tiga semester yang di maksud dalam pelaksanaannya dapat berbentuk kegiatan 1 semester mahasiswa berkesempatan untuk mengambil sejumlah SKS dengan beberapa mata kuliah di luar program studi yang berada di perguruan tinggi asal dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal. Kegiatan pembelajaran 2 semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus seperti dalam bentuk kegiatan pertukaran pelajar-mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, kegiatan kemanusiaan, proyek independen, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik) dan kewirausahaan. Melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Program Studi HTN-I (Siyasah Syar'iyah) dalam penyelenggaraan program pendidikannya memberikan fasilitas dan ruang kebebasan serta kemandirian belajar bagi mahasiswa Program Studi HTN-I (Siyasah Syar'iyah) dalam menentukan pilihan sejumlah matakuliah dan kegiatan sebagai instrumen pendukung capaian pembelajaran lulusan yang merupakan wujud dari kompetensi atau capaian pembelajaran tambahan.

Kebijakan ini melengkapi sejumlah kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dengan fokus utamanya pada peningkatan mutu pendidikan tinggi termasuk pada PTKI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Untuk mengimplementasikan program hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam implementasi di masing-masing Program Studi.

2. LANDASAN KURIKULUM

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 20,21 dan 31
2. Undang-Undang No.20 TH. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Presiden RI No. 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.
11. Keputusan Direktur Pendidikan Islam nomer 706 Tahun 2018 Tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
12. Permenristek dikti Nomer 123 Tahun 2019, tentang Magang Industri dan pengakuan satuan kredit semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

3. STRUKTUR KURIKULUM

a) Visi, Misi dan Tujuan

VISI : “Unggul dalam Studi Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) yang Berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Saleh, Moderat dan Cerdas”

MISI :

- Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) Berwawasan Kebangsaan yang Menghasilkan Sarjana, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.
- Menyelenggarakan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) Bereputasi Nasional dan Internasional.
- Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat dan produktif.
- Melaksanakan Kerjasama pada Tingkat Nasional dan Internasional dalam Pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) dan peningkatan daya saing lulusan.
- Menyelenggarakan Tata Kelola dan Kepemimpinan yang berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) yang bersih dan berwibawa

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) Berwawasan Kebangsaan yang Menghasilkan Sarjana, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) Bereputasi Nasional dan Internasional.
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat dan produktif.
4. Meningkatkan Kualitas Kerjasama pada Tingkat Nasional dan Internasional dalam Pengembangan bidang ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) dan peningkatan daya saing lulusan.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kepemimpinan yang berwawasan Kebangsaan dalam Membangun Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar’iyyah) yang bersih dan berwibawa.

b) Profil Lulusan

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Utama:	
	Praktisi Hukum	Sarjana Hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu

		melaksanakan tugas sebagai <i>praktisi</i> hukum sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan
	Akademisi	Sarjana Hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu menjalankan tugas sebagai <i>akademisi</i> sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.
	Legal Drafter	Sarjana Hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu <i>menyusun rancangan perundan- undangan</i> dalam bidang hukum tata negara sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.
	Peneliti	Sarjana Hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai <i>peneliti</i> bidang Hukum Tata negara Islam (Siyasah Syar'iyah) sesuai nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.
2	Pendukung:	
	Organisatoris Hukum dan Politik	Sarjana Hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas sebagai organisatoris hukum dan politik sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.

c) Capaian Pembelajaran Program Studi

1) Sikap

- Lulusan mampu menunjukkan sikap Ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum Tata negara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara mandiri
- Lulusan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsyah)

- 2) Pengetahuan
 - Lulusan mampu menguasai teori bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara menyeluruh
- 3) Keterampilan Umum
 - Lulusan mampu berkomunikasi secara efektif
 - Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat
- 4) Keterampilan Khusus
 - Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) dalam menganalisa perkara Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah)
 - Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) yang dihadapi dengan baik
 - Lulusan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data terkait dengan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) dengan tepat
 - Lulusan mampu mengembangkan langkah-langkah problem solving dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara kreatif.

d) Pemetaan Bahan Kajian

no	CPL	BAHAN KAJIAN
1	Lulusan mampu menunjukkan sikap Ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara khusus	Pengembangan Karakter, Ilmu Fiqh Ilmu Hukum Ilmu Sosial Bahasa dan Komunikasi
2	Lulusan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum keluarga (akhwalul syakhsiyah)	Ilmu Kewirausahaan Teknologi dan Informasi Pengembangan Karakter Ilmu Manajemen
3	Lulusan mampu menguasai teori bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara menyeluruh	Ilmu Fiqh Ilmu Hukum Ilmu Sosial
4	Lulusan mampu berkomunikasi secara efektif	Bahasa dan Komunikasi Teknologi dan Informasi

		Karya Ilmiah
5	Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat	Ilmu Manajemen Pengembangan Karakter Ilmu Kewirausahaan
6	Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) dalam menganalisa perkara Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah)	Ilmu Fiqh Ilmu Hukum Ilmu Sosial Karya Ilmiah Teknologi dan Informasi
7	Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) yang dihadapi dengan baik	Ilmu Fiqh Ilmu Hukum Ilmu Sosial Karya Ilmiah Teknologi dan Informasi
8	Lulusan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data terkait dengan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) dengan tepat	Karya Ilmiah Teknologi dan Informasi Bahasa dan Komunikasi
9	Lulusan mampu mengembangkan langkah-langkah problem solving dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara kreatif.	Ilmu Fiqh Ilmu Hukum Ilmu Sosial Karya Ilmiah Pengembangan Karakter Ilmu Manajemen

Total Bahan Kajian :

Ilmu Fiqh
Ilmu Hukum
Ilmu Sosial
Karya Ilmiah
Pengembangan Karakter
Ilmu Manajemen
Karya Ilmiah
Teknologi dan Informasi
Bahasa dan Komunikasi

No	CAPAIAN PEMBELAJARAN	BAHAN KAJIAN /PROGRAM	MATA KULIAH/ KEGIATAN
1	Lulusan mampu menunjukkan sikap Ihsan atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara khusus	Pengembangan Karakter	Akhlak Tasawuf Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan PPL Studi Islam
		Ilmu Fiqh -Fiqh (Hukum2 Islam) -Pemikiran Islam Klasik Kontemporer (Termasuk Perbandingan Fiqh Siyasah) -Tafsir ayat Ahkam (termasuk ulumul quran, Tafsir Ayat Siyasah) -Hadis Ahkam (termasuk ulumul hadis, Hadis Siyasah) -Fiqh Siyasah (Dasar-dasar) Dusturiyah (Dauliyah, idariyah, Maliyah, Harbiyah)	Bahtsul Kitab as-Siyasah Filsafat Hukum Islam Fiqh Keindonesiaan Fiqh Ibadah Fiqh Jinayah Fiqh Mawaris Fiqh Muamalah Fiqh Munakahat Fiqh Muqaranah Fiqh Siyasah Hadis Ahkam Ilmu Tauhid Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporer Qawaid Fiqhiyah Siyasah Syar'iyah Tafsir Ayat Ahkam Tahsinul Qur'an Tarikh Tasyri' Ushul Fiqh
		Ilmu Hukum Hukum Pemerintahan Daerah (Hukum pemerintahan Desa, Hukum perencanaan Pembangunan)	Advokasi Dasar-Dasar Ilmu Politik Etika Profesi Hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana

		<p>Ilmu dan Teknik Perundang-undangan (Termasuk Legal Drafting)</p> <p>Teori dan Hukum Konstitusi (Legislasi Perda Syariah, Hukum Partai Politik dan Pemilu)</p>	<p>Hukum Adat</p> <p>Hukum Administrasi Negara</p> <p>Hukum Agraria</p> <p>Hukum Keuangan Negara</p> <p>Hukum Lingkungan</p> <p>Hukum Pemerintahan Daerah</p> <p>Hukum Perdata</p> <p>Hukum Pidana</p> <p>Hukum Tata Negara</p> <p>Hukum Zakat dan Pajak</p> <p>Ilmu dan Teknik Perundang-undangan</p> <p>Pengantar Ilmu Hukum</p> <p>Praktik Peradilan Semu</p> <p>Perbandingan Hukum Tata Negara</p> <p>Politik Hukum</p> <p>Teori dan Hukum Konstitusi</p>
		Ilmu Sosial	<p>Pendidikan Kewarganegaraan</p> <p>Pengantar Ilmu Hukum</p> <p>Sosiologi dan Antropoligi Hukum</p>
		Bahasa dan Komunikasi	<p>Bahasa Arab</p> <p>Bahasa Indonesia</p> <p>Bahasa Inggris</p> <p>Skripsi</p>
2	<p>Lulusan mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum Tatanegara Islam (Islam (Siyasah Syar'iyah)</p>	Ilmu Kewirausahaan	Digital Interpreneership
		Teknologi dan Informasi	<p>Digital Interpreneership</p> <p>Literasi Digital</p>
		Pengembangan Karakter	<p>Akhlak Tasawuf</p> <p>Kuliah Kerja Nyata (KKN)</p> <p>Pancasila</p> <p>Pendidikan Kewarganegaraan</p> <p>PPL</p> <p>Studi Islam</p>

		Ilmu Manajemen	Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Perdata Manajemen Pemerintahan
3	Lulusan mampu menguasai teori bidang Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara menyeluruh	Ilmu Fiqh	Bahtsul Kitab as-Siyasah Filsafat Hukum Islam Fiqh Keindonesiaan Fiqh Ibadah Fiqh Jinayah Fiqh Mawaris Fiqh Muamalah Fiqh Munakahat Fiqh Muqaranah Fiqh Siyasah Hadis Ahkam Ilmu Tauhid Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporer Qawaid Fiqhiyah Siyasah Syar'iyah Studi Islam Tafsir Ayat Ahkam Tahsinul Qur'an Tarikh Tasyri' Ushul Fiqh
		Ilmu Hukum	Advokasi Dasar-Dasar Ilmu Politik Etika Profesi Hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria Hukum Keuangan Negara

			Hukum Lingkungan Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Zakat dan Pajak Ilmu dan Teknik Perundang-undangan Pengantar Ilmu Hukum Praktik Peradilan Semu Perbandingan Hukum Tata Negara Politik Hukum Teori dan Hukum Konstitusi
		Ilmu Sosial	Pengantar Ilmu Hukum Sosiologi dan Antropoligi Hukum
4	Lulusan mampu berkomunikasi secara efektif	Bahasa dan Komunikasi	Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Skripsi
		Teknologi dan Informasi	Literasi Digital
		Karya Ilmiah	Metodologi Penelitian Hukum Metodologi Penelitian Skripsi
5	Lulusan mampu mengambil keputusan strategis untuk pengembangan diri dengan tepat	Ilmu Manajemen	Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Perdata Manajemen Pemerintahan
		Pengembangan Karakter	Akhlak Tasawuf Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan PPL Studi Islam

		Ilmu Kewirausahaan	Digital Interpreneership
6	Lulusan mampu mengimplementasikan teori bidang Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) dalam menganalisa perkara Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)	Ilmu Fiqh	Bahtsul Kitab as-Siyasah Filsafat Hukum Islam Fiqh Keindonesiaan Fiqh Ibadah Fiqh Jinayah Fiqh Mawaris Fiqh Muamalah Fiqh Munakahat Fiqh Muqaranah Fiqh Siyasah Hadis Ahkam Hukum Acara Perdata Ilmu Tauhid Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporer Qawaid Fiqhiyah Siyasah Syar'iyah Tafsir Ayat Ahkam Tahsinul Qur'an Tarikh Tasyri' Ushul Fiqh
		Ilmu Hukum	Advokasi Dasar-Dasar Ilmu Politik Etika Profesi Hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria Hukum Keuangan Negara Hukum Lingkungan

			Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Zakat dan Pajak Ilmu dan Teknik Perundang-undangan Pengantar Ilmu Hukum Praktik Peradilan Semu Perbandingan Hukum Tata Negara Politik Hukum Teori dan Hukum Konstitusi
		Ilmu Sosial	Sosiologi dan Antropoligi Hukum
		Karya Ilmiah	Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Metodologi Penelitian Hukum Metodologi Penelitian Skripsi
		Teknologi dan Informasi	Digital Interpreneursip Literasi Digital
7	Lulusan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah) yang dihadapi dengan baik	Ilmu Fiqh	Bahtsul Kitab as-Siyasah Filsafat Hukum Islam Fiqh Keindonesiaan Fiqh Ibadah Fiqh Jinayah Fiqh Mawaris Fiqh Muamalah Fiqh Munakahat Fiqh Muqaranah Hadis Ahkam Ilmu Tauhid Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporer

			Qawaid Fiqhiyah Siyasah Syar'iyah Tafsir Ayat Ahkam Tarikh Tasyri' Ushul Fiqh
		Ilmu Hukum	Advokasi Dasar-Dasar Ilmu Politik Etika Profesi Hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria Hukum Keuangan Negara Hukum Lingkungan Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Zakat dan Pajak Pengantar Ilmu Hukum Praktik Peradilan Semu Perbandingan Hukum Tata Negara Politik Hukum Teori dan Hukum Konstitusi
		Ilmu Sosial	PPL Sosiologi dan Antropoligi Hukum Kuliah Kerja Nyata (KKN)
		Karya Ilmiah	Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Metodologi Penelitian Hukum

			Metodologi Penelitian Skripsi
		Teknologi dan Informasi	Literasi Digital
8	Lulusan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam pengelolaan data terkait dengan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) dengan tepat	Karya Ilmiah	Metodologi Penelitian Hukum Metodologi Penelitian Skripsi
		Teknologi dan Informasi	Digital Interpreneursip Literasi Digital
		Bahasa dan Komunikasi	Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Skripsi
9	Lulusan mampu mengembangkan langkah-langkah problem solving dalam menyelesaikan sengketa Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) secara kreatif.	Ilmu Fiqh	Filsafat Hukum Islam Fiqh Keindonesiaan Fiqh Ibadah Fiqh Jinayah Fiqh Mawaris Fiqh Muamalah Fiqh Munakahat Fiqh Muqaranah Hadis Ahkam Hukum Acara Perdata Tafsir Ayat Ahkam Tarikh Tasyri' Ushul Fiqh
		Ilmu Hukum	Advokasi Dasar-Dasar Ilmu Politik Etika Profesi Hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Adat

			Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria Hukum Keuangan Negara Hukum Lingkungan Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Tata Negara Hukum Zakat dan Pajak Ilmu dan Teknik Perundang-undangan Pengantar Ilmu Hukum Praktik Peradilan Semu Politik Hukum Teori dan Hukum Konstitusi
		Ilmu Sosial	Sosiologi dan Antropoligi Hukum
		Karya Ilmiah	Metodologi Penelitian Hukum Metodologi Penelitian Skripsi
		Pengembangan Karakter	Akhlak Tasawuf Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan PPL Studi Islam
		Ilmu Manajemen	Hukum Pemerintahan Daerah Hukum Perdata Manajemen Pemerintahan

e) Struktur dan Sebaran Mata Kuliah dan SKS

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	KOMPONENE MATA KULIAH				SEMESTER	JUMLAH SKS	STATUS		TEMPAT KULIAH			
			MKWU	MKKU	MKKP	MKLP			WAJIB	PILIHAN	PTKIN		LUAR PTKIN	
											PRODI ASAL	BEDA PRODI	PT	DUNIA USAHA/ INDUSTRI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Nasional													
1		pancasila	√					2	√					
2		Pendidikan Kewarganegaraan	√					2	√					
3		Bahasa Indonesia	√					3	√					
								7						
II	Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Institusional													
1		bahasa Arab	√					3	√					
2		BahasaInggris	√					3	√					
3		Studi Islam	√					2	√					
								8						
III	Mata Kuliah dan Keahlian Keilmuan													
1		Advokasi		√				3	√					

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	KOMPONENE MATA KULIAH				SEMESTER	JUMLAH SKS	STATUS		TEMPAT KULIAH			
			MKWU	MKKU	MKKP	MKLP			WAJIB	PILIHAN	PTKIN		LUAR PTIKN	
											PRODI ASAL	BEDA PRODI	PT	DUNIA USAHA/ INDUSTRI
2		Akhlak Tasawuf,		√				2	√					
3		Bahtsul Kitab as-Siyasah,		√				2	√					
4		Etika Profesi Hukum,		√				2	√					
5		Fiqh Keindonesia (Islam Nusantara)		√		√		2	√					
6		Fiqh Ibadah,		√				3	√					
7		Fiqh Jinayah,		√				2	√					
8		Fiqh Mawaris,		√				2	√					
9		Fiqh Muamalah,		√				2	√					
10		Fiqh Munakahat,		√				2	√					
11		Fiqh Siyasah (Dasar-Dasar Fiqh)		√				2	√					
12		Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,		√		√		3	√					
13		Hukum Acara Perdata (Termasuk Hukum Acara Peradilan Agama)		√		√		4	√					
14		Hukum Acara Pidana,		√		√		3	√					
15		Hukum Adat,		√				2	√					
16		Hukum Administrasi		√				2	√					

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	KOMPONENE MATA KULIAH				SEMESTER	JUMLAH SKS	STATUS		TEMPAT KULIAH			
			MKWU	MKKU	MKKP	MKLP			WAJIB	PILIHAN	PTKIN		LUAR PTIKN	
											PRODI ASAL	BEDA PRODI	PT	DUNIA USAHA/ INDUSTRI
		Negara,												
17		Hukum Agraria,		√		√		2	√					
18		Hukum Keuangan Negara,			√	√		2		√				
19		Hukum Lingkungan,		√				2	√					
20		Hukum Pemerintahan (Daerah Hukum pemerintahan Desa, Hukum perencanaan Pembangunan)		√		√		3	√					
21		Hukum Perdata,		√				3	√					
22		Hukum Pidana,		√				2	√					
23		Hukum TataNegara,		√				2	√					
24		Hukum Zakat dan Pajak,			√	√		2		√				
25		Ilmu dan Teknik Perundang-undangan,		√		√		3	√					
26		Ilmu Tauhid,		√				2	√					
27		Literasi Digital (termasuk fiqh media sosial)		√				3	√					
28		Manajemen			√	√		2		√				

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	KOMPONENE MATA KULIAH				SEMESTER	JUMLAH SKS	STATUS		TEMPAT KULIAH			
			MKWU	MKKU	MKKP	MKLP			WAJIB	PILIHAN	PTKIN		LUAR PTKIN	
											PRODI ASAL	BEDA PRODI	PT	DUNIA USAHA/ INDUSTRI
		Pemerintahan,												
29		Metodologi Penelitian Hukum,		√			3	√						
30		Pemikiran Islam Klasik Kontemporer (Termasuk Perbandingan Fiqh Siyasah)		√			3	√						
31		Perbandingan Hukum Tata Negara,			√		2		√					
32		Politik Hukum,		√			2	√						
33		Siyasah Syar'iyah (Dusturiyah, Dauliyah, idariyah, Maliyah, Harbiyah)		√		√	3	√						
34		Skripsi.		√			6	√						
35		Sosiologi dan Antropologi Hukum,		√			2	√						
36		Tahsinul Quran,		√			2	√						
37		Tarikh Tasyri'		√			2	√						
38		Teori dan Hukum Konstitusi,		√			2	√						
							93							
IV	Mata Kuliah Dasar													

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	KOMPONENE MATA KULIAH				SEMESTER	JUMLAH SKS	STATUS		TEMPAT KULIAH			
			MKWU	MKKU	MKKP	MKLP			WAJIB	PILIHAN	PTKIN		LUAR PTIKN	
											PRODI ASAL	BEDA PRODI	PT	DUNIA USAHA/ INDUSTRI
	Keahlian													
1		Ushul Fiqh,		√			4	√						
2		Qawaid Fiqiyah,		√			3	√						
3		Pengantar Ilmu Hukum (Termasuk Pengantar Hukum Indonesia)		√			3	√						
4		Dasar-Dasar Ilmu Politik		√			2	√						
5		Tafsir Ayat Ahkam (termasuk ulumul quran, Tafsir Ayat Siyasah)		√			4	√						
6		Hadis Ahkam (termasuk ulumul hadis, Hadis Siyasah)		√			4	√						
7		Metodologi Penelitian,		√			3	√						
8		Fiqh Muqaran		√			2	√						
9		Filsafat Hukum Islam,		√			2	√						
							27							
VI	Mata Kuliah Keahlian Berkarya													

NO	KODE	NAMA MATA KULIAH	KOMPONENE MATA KULIAH				SEMESTER	JUMLAH SKS	STATUS		TEMPAT KULIAH			
			MKWU	MKKU	MKKP	MKLP			WAJIB	PILIHAN	PTKIN		LUAR PTKIN	
											PRODI ASAL	BEDA PRODI	PT	DUNIA USAHA/ INDUSTRI
1		Praktik Peradilan Semu		√		√		3	√					
2		PPL		√		√		3	√					
3		Digital interpreneursip		√				3	√					
								9						
IV	Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat													
1		KKN		√		√		4	√					
								4						

TOTAL SKS : 148 SKS
TOTAL MATA KULIAH : 57

SEBARAN KURIKULUM

NO	KODE	MATAKULIAH	SEMESTER	KETERANGAN	SKS
1	NAS-110201	Pancasila	I	WAJIB	2
2	NAS-110202	Pendidikan kewarganegaran	I	WAJIB	2
3	NAS-110303	Bahasa indonesia	I	WAJIB	3
		JUMLAH SKS			7
1	UIN-110201	Studi islam	I	WAJIB	2
2	UIN-110302	Bahasa arab	I	WAJIB	3
3	UIN-110303	Bahasa inggris	I	WAJIB	3
		JUMLAH SKS			8
1	SYA-210201	Ilmu Tauhid	II	WAJIB	2
2	SYA-210202	Akhlak Tasawuf	II	WAJIB	2
3	SYA-210203	Tarikh Tasyri'	II	WAJIB	2
4	SYA-210304	Fiqh Ibadah	II	WAJIB	3
5	SYA-310405	Ushul Fiqh	III	WAJIB	4
6	SYA-410306	Qawaid Fiqhiyah	IV	WAJIB	3
7	SYA-110307	Pengantar Ilmu Hukum	I	WAJIB	3
8	SYA-310308	Hukum Perdata	III	WAJIB	3
9	SYA-310209	Hukum Pidana	III	WAJIB	2
10	SYA-410210	Hukum Adat	IV	WAJIB	2
11	SYA-110211	Tahsinur Qur'an	I	WAJIB	2
		JUMLAH			28
1	HTN-210201	Fiqh Muamalah	II	WAJIB	2

2	HTN-410202	Fiqh Munakahah	IV	WAJIB	2
3	HTN-410203	Fiqh Mawaris	IV	WAJIB	2
4	HTN-310204	Fiqh Muqaranah	III	WAJIB	2
5	HTN-210205	Fiqh Jinayah	II	WAJIB	2
6	HTN-310206	Fiqh Siyasah	III	WAJIB	2
7	HTN-610207	Fiqh Keindonesiaan	VI	WAJIB	2
8	HTN-310408	Hadis Siyasah	III	WAJIB	4
9	HTN-310409	Tafsir Ayat Siyasah	III	WAJIB	4
10	HTN-410210	Filsafat Hukum Islam	IV	WAJIB	2
11	HTN-610311	Siyasah Syar'iyah	VI	WAJIB	3
12	HTN-710212	Bahtsul Kitab as-Siyasah	VII	WAJIB	2
13	HTN-710313	Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporer	VII	WAJIB	3
14	HTN-210214	Dasar-Dasar Politik	II	WAJIB	2
15	HTN-210215	Hukum Tata Negara	II	WAJIB	2
16	HTN-410216	Hukum Administrasi Negara	IV	WAJIB	2
17	HTN-410217	Hukum Lingkungan	IV	WAJIB	2
18	HTN-410218	Teori dan Hukum Konstitusi	IV	WAJIB	2
19	HTN-410219	Sosiologi dan Antropologi Hukum,	IV	WAJIB	2
20	HTN-420220	Perbandingan Hukum Tata Negara	IV	PILIHAN	2
21	HTN-510221	Hukum Agraria	V	WAJIB	2
22	HTN-610322	Hukum Pemerintahan Daerah	VI	WAJIB	3
23	HTN-620223	Hukum Zakat dan Pajak,	VI	PILIHAN	2
24	HTN-620224	Manajemen Pemerintahan,	VI	PILIHAN	2
25	HTN-610225	Politik Hukum	VI	WAJIB	2
26	HTN-620226	Hukum Keuangan Negara	VI	PILIHAN	2
27	HTN-710327	Advokasi	VII	WAJIB	3

28	HTN-710228	Etika Profesi Hukum	VII	WAJIB	2
29	HTN-210329	Literasi Digital	II	WAJIB	3
30	HTN-710330	Digital Enterprenership	VII	WAJIB	3
31	HTN-310331	Metodologi Penelitian	III	WAJIB	3
32	HTN-410332	Metodologi Penelitian Hukum	IV	WAJIB	3
33	HTN-510433	Hukum Acara Perdata	V	WAJIB	4
34	HTN-510334	Hukum Acara Pidana	V	WAJIB	3
35	HTN-510335	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	V	WAJIB	3
36	HTN-510336	Ilmu dan Teknik Perundang-Undangan	V	WAJIB	3
37	HTN-510337	Praktik Peradilan Semu	V	WAJIB	3
38	HTN-510338	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	V	WAJIB	3
39	HTN-610439	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	VI	WAJIB	4
40	HTN-810640	Skripsi	VIII	WAJIB	6
		JULMLAH SKS			105

TOTAL MATA KULIAH : 57
TOTAL SKS : 148

AGIHAN MATA KULIAH HTN-I (SIYASAH SYAR'IYAH)

SEMESTER I

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	NAS-110201	Pancasila	2
2	NAS-110202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	NAS-110303	Bahasa Indonesia	3
4	UIN-110201	Studi Islam	2
5	UIN-110302	Bahasa Arab	3
6	UIN-110303	Bahasa Inggris	3
7	SYA-110307	Pengantar Ilmu Hukum	3
8	SYA-110211	Tahsinul Quran	2
		JUMLAH	20

SEMESTER II

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	SYA-210201	Ilmu Tauhid	2
2	SYA-210202	Alkhilak Tasawuf	2
3	SYA-210203	Tarikh Tasyri'	2
4	SYA-210304	Fiqh Ibadah	3
5	HTN-210214	Dasar-Dasar Politik	2
6	HTN-210215	Hukum Tata Negara	2
7	HTN-210201	Fiqh Muamalah	2
8	HTN-210205	Fiqh Jinayah	2
9	HTN-210329	Literasi Digital	3
		JUMLAH	20

SEMESTER III

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	SYA-310405	Ushul Fiqh	4
2	SYA-310308	Hukum Perdata	3
3	SYA-310209	Hukum Pidana	2
4	HTN-310408	Hadis Siyasah	4
5	HTN-310409	Tafsir Ayat Siyasah	4
6	HTN-310204	Fiqh Muqaranah	2
7	HTN-310206	Fiqh Siyasah	2
8	HTN-310331	Metodologi Penelitian	3
		JUMLAH	24

SEMESTER IV

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	SYA-410306	Qawaid Fiqiyah	3
2	SYA-410210	Hukum Adat	2
3	HTN-410210	Filsafat Hukum Islam	2
4	HTN-410332	Metodologi Penelitian Hukum	3
5	HTN-410202	Fiqh Munakahah	2
6	HTN-410203	Fiqh Mawaris	2
7	HTN-410216	Hukum Administrasi Negara	2
8	HTN-410217	Hukum Lingkungan	2
9	HTN-410218	Teori dan Hukum Konstitusi	2
10	HTN-410219	Sosiologi dan Antropologi Hukum	2
11	HTN-420220	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
		JUMLAH SKS	24

SEMESTER V: MAGANG MBKM

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HTN-510433	Hukum Acara Perdata	4
2	HTN-510334	Hukum Acara Pidana	3
3	HTN-510335	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3
4	HTN-510336	Ilmu dan Teknik Perundang-Undangan	3
5	HTN-510221	Hukum Agraria	2
6	HTN-510337	Praktik Peradilan Semu	3
7	HTN-510338	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	3
		JUMLAH SKS	21

SEMESTER VI: KKN TEMATIK

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HTN-610439	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4
2	HTN-610322	Hukum Pemerintahan Daerah	3
3	HTN-620223	Hukum Zakat dan Pajak,	2
4	HTN-620224	Manajemen Pemerintahan	2
5	HTN-610207	Fiqh Keindonesiaan	2
6	HTN-610225	Politik Hukum	2
7	HTN-620226	Hukum Keuangan Negara,	2
8	HTN-610311	Siyasah Syar'iyah (Dusturiyah, Dauliyah, idariyah, Maliyah, Harbiyah)	3
		JUMLAH SKS	20

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HTN-710327	Advokasi	3
2	HTN-710228	Etika Profesi Hukum	2
3	HTN-710313	Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporer	3
4	HTN-710330	Digital Enterprenership	3
5	HTN-710212	Bahtsul Kitab as-Siyasah	2
		JUMLAH SKS	13

SEMESTER VIII

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HTN-810640	Skripsi	6
		JUMLAH SKS	6

KELUASAN DAN KEDALAMAN MATA KULIAH

NO	MATA KULIAH	KELUASAN	KEDALAMAN	BEBAN	SKS
1	Advokasi	5	3	15	2,98
2	Akhlak Tasawuf,	4	2	8	1,59
3	Bahasa Arab	5	3	15	2,98
4	Bahasa Indonesia,	5	3	15	2,98
5	Bahasa Inggris	5	3	15	2,98
6	Bahtsul Kitab as-Siyasah,	4	3	12	2,38
7	Dasar-Dasar Ilmu Politik	5	2	10	1,98
8	Digital interprenership (termasuk dasar-dasar kewirausahaan teori dan praktik)	5	3	15	2,98
9	Etika Profesi Hukum,	5	2	10	1,98
10	Filsafat Hukum Islam,	5	2	10	1,98
11	Fiqh Keindonesian (Islam Nusantara)	5	2	10	1,98
12	Fiqh Ibadah,	5	3	15	2,98
13	Fiqh Jinayah,	5	2	10	1,98
14	Fiqh Mawaris,	5	2	10	1,98
15	Fiqh Muamalah,	5	2	10	1,98
16	Fiqh Munakahat,	5	2	10	1,98
17	Fiqh Muqaranah	5	2	10	1,98
18	Fiqh Siyasah (Dasar-Dasar Fiqh)	3	4	12	2,38
19	Hadis Ahkam (termasuk ulumul hadis, Hadis Siyasah)	5	4	20	3,97
20	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,	5	3	15	2,98
21	Hukum Acara Perdata (Termasuk Hukum Acara Peradilan Agama)	7	3	21	4,17
22	Hukum Acara Pidana,	5	3	15	2,98
23	Hukum Adat,	5	2	10	1,98
24	Hukum Administrasi Negara,	5	2	10	1,98

25	Hukum Agraria,	5	2	10	1,98
26	Hukum Keuangan Negara,	5	2	10	1,98
27	Hukum Lingkungan,	5	2	10	1,98
28	Hukum Pemerintahan Daerah (Hukum pemerintahan Desa, Hukum perencanaan Pembangunan)	8	2	16	3,17
29	Hukum Perdata,	8	2	16	3,17
30	Hukum Pidana,	5	2	10	1,98
31	Hukum TataNegara,	5	2	10	1,98
32	Hukum Zakat dan Pajak,	5	2	10	1,98
33	Ilmu dan Teknik Perundang-undangan (Legal Drafting)	4	4	16	3,17
34	Ilmu Tauhid,	4	2	8	1,59
35	KKN	5	4	20	3,97
36	Literasi Digital (termasuk fiqh media sosial)	5	3	15	2,98
37	Manajemen Pemerintahan,	3	3	9	1,79
38	Metodologi Penelitian Hukum,	5	3	15	2,98
39	Metodologi Penelitian,	5	3	15	2,98
40	Pancasila,	4	2	8	1,59
41	Pemikiran Politik Islam Klasik Kontemporer (Termasuk Perbandingan Fiqh Siyasah)	4	4	16	3,17
42	Pendidikan Kewarganegaraan,	5	2	10	1,98
43	Pengantar Ilmu Hukum (Termasuk Pengantar Hukum Indonesia)	7	2	14	2,78
44	Praktik Peradilan Semu	5	3	15	2,98
45	Perbandingan Hukum Tata Negara,	4	3	12	2,38
46	Politik Hukum,	5	2	10	1,98
47	PPL	5	3	15	2,98
48	Qawaid Fiqiyah,	4	4	16	3,17
49	Siyasah Syar'iyah (Dusturiyah, Dauliyah, idariyah, Maliyah, Harbiyah)	4	4	16	3,17
50	Skripsi.	8	4	32	6,35

51	Sosiologi dan Antropologi Hukum,	5	2	10	1,98
52	Studi Islam,	5	2	10	1,98
53	Tafsir Ayat Ahkam (termasuk ulumul quran, Tafsir Ayat Siyasah)	5	4	20	3,97
54	Tahsinul Quran,	3	3	9	1,79
55	Tarikh Tasyri'	5	2	10	1,98
56	Teori dan Hukum Konstitusi,	5	2	10	1,98
57	Ushul Fiqh,	5	4	20	3,97
JUMLAH				746	148

MODEL PENERAPAN KURIKULUM MBKM HTN-I (Siyasah Syar'iyah)

SEMESTER I	SEMESTER II	SEMESTER III	SEMESTER IV
20 SKS	20 SKS	24 SKS	24 SKS
Pancasila (2 SKS)	Ilmu Tauhid (2 SKS)	Ushul Fiqh (4 SKS)	Qawaid Fiqiyah (3 SKS)
Pendidikan Kewarganegaraan	Alkhlak Tasawuf (2 SKS)	Hukum Perdata (3 SKS)	Hukum Adat (2 SKS)
Bahasa Indonesia (3 SKS)	Tarikh Tasyri' (2 SKS)	Hukum Pidana (2 SKS)	Filsafat Hukum Islam (2 SKS)
Studi Islam (2 SKS)	Fiqh Ibadah (3 SKS)	Hadis Siyasah (4 SKS)	Metodologi Penelitian Hukum (3SKS)
Bahasa Arab (3 SKS)	Dasar-Dasar Politik (2 SKS)	Tafsir Ayat Siyasah (4 SKS)	Fiqh Munakahah (2 SKS)
Bahasa Inggris (3 SKS)	Hukum Tata Negara (2 SKS)	Fiqh Muqaranah (2 SKS)	Fiqh Mawaris (2 SKS)
Pengantar Ilmu Hukum (3SKS)	Fiqh Muamalah (2 SKS)	Fiqh Siyasah (2 SKS)	Hukum Administrasi Negara (2 SKS)
Tahsinul Quran (2 SKS)	Fiqh Jinayah (2 SKS)	Metodologi Penelitian (3 SKS)	Hukum Lingkungan (2 SKS)
	Literasi Digital (2 SKS)		Teori dan Hukum Konstitusi (2 SKS)
			Sosiologi dan Antropologi Hukum (2 SKS)
			Perbandingan Hukum Tata Negara (2 SKS)
			20 SKS DAPAT DIAMBIL DI PRODI LAIN

SEMESTER V	SEMESTER VI	SEMESTER VII	SEMESTER VIII
21 SKS	20 SKS	13 SKS	6 SKS
Hukum Acara Perdata (4 SKS)	Kuliah Kerja Nyata (KKN) (4 SKS)	Advokasi (3 SKS)	SKRIPSI (6 SKS)
Hukum Acara Pidana (3 SKS)	Hukum Pemerintahan Daerah (3 SKS)	Etika Profesi Hukum (2 SKS)	
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (3 SKS)	Hukum Zakat dan Pajak (2 SKS)	Pemikiran Politik Islam Klasik dan Kontemporer (3 SKS)	
Ilmu dan Teknik Perundang-Undangan (3 SKS)	Manajemen Pemerintahan (2 SKS)	Digital Enterprenership (3 SKS)	
Hukum Agraria (2 SKS)	Fiqh Keindonesiaan (2 SKS)	Bahtsul Kitab as-Siyasah (2 SKS)	
Praktik Peradilan Semu (2 SKS)	Politik Hukum (2 SKS)		
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (3 SKS)	Hukum Keuangan Negara (2 SKS)		
	Siyasah Syar'iyah (3 SKS)		

f) Proses Pendekatan dan metode pembelajaran

Dalam proses pembelajaran terdapat 16 (Enam Belas) kali pertemuan dengan pertemuan ke 8 (delapan) adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan pertemuan ke 16 merupakan Ujian Akhir Semester (UAS). Proses pembelajaran dengan metode daring dan tatap muka menyesuaikan disetiap pertemuan ada Topik, Indikator serta Metode Pembelajaran yang harus dipenuhi mahasiswa. Setiap mata perkuliahan terdapat waktu dan buku rujukan sesuai dengan ketentuan.

g) Penilaian

Penilaian menggunakan format sebagai berikut :

1. Nilai Presensi/ Proses	:10%
2. Nilai Tugas Terstruktur	:15%
3. Nilai Tugas Mandiri	:15%
4. Nilai Ujian Tengah Semester	:25%
5. Nilai Ujian Akhir Semester	: 35%

Dengan kriteri penilaian sebagai berikut:

1. A= 85-100;
2. A-= 80-84;
3. B+= 75-79;
4. B= 70-74;
5. C+= 60-64;
6. C= 55-59;
7. D= 45-54;
8. E= <45

PENUTUP

Penyusunan Kurikulum Pendidikan sangat penting bagi Penunjang Kualitas Sebuah Perguruan Tinggi dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Kurikulum pembelajaran dalam pendidikan harus dibenahi, pembelajaran yang merupakan peraduan dari aktivitas belajar dan mengajar memiliki tujuan yang baik, yakni mengubah perilaku seseorang ke arah yang lebih baik guna untuk masa depan yang sukses. Dalam pendidikan ada banyak faktor yang terlibat dalam proses pembelajaran. Misalnya saja di Perguruan Tinggi ada Dosen, Mahasiswa, fasilitas yang telah disediakan, program dan tujuan, rencana, dan yang tak kalah urgen kurikulum.

Pembelajaran mempunyai beberapa prinsip penting yang baik untuk diketahui. Sehingga terwujudnya tujuan pembelajaran itu sendiri bisa tercapai dengan baik. Dalam suatu pembelajaran di Perguruan Tinggi tidak terlepas dari permasalahan yang dapat mengganggu proses terjadinya belajar mengajar, tetapi permasalahan tersebut bisa diatasi apabila semua pihak dapat bersatu untuk mengatasinya diantaranya dengan Desain Kurikulum yang baik. Penyusun menyadari dalam mendesain kurikulum ini, terdapat banyak kekurangan dan kealfaan. Sehingga sangat mengharapkan saran demi kesempurnaan.